

## ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR NEGARA DAN KABUPATEN AGAM TAHUN 2020

Tengku Zahwa Hafizah<sup>1</sup>, Fayza Dealova Y<sup>2</sup>, Sheren Velicia A<sup>3</sup>, Nabila Azzahra<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Syiah Kuala

[fayzadealova@gmail.com](mailto:fayzadealova@gmail.com)

Received: 03-06-2024

Revised: 10-06-2024

Approved: 15-06-2024

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Negara dan Kabupaten Agam untuk tahun anggaran 2020. Kabupaten Banjar Negara dan Kabupaten Agam dipilih sebagai objek karena memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, sehingga analisis dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan analisis meliputi rasio keuangan seperti kemandirian keuangan, efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), dan keserasian anggaran untuk mengevaluasi tingkat kemandirian, efektivitas, dan strategi alokasi anggaran kedua kabupaten. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua kabupaten memiliki tingkat kemandirian keuangan yang baik dengan rasio di bawah 20%, menandakan ketergantungan yang rendah terhadap sumber dana eksternal. Keduanya juga mencatatkan rasio efektivitas PAD di atas 90%, menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi PAD telah dilakukan secara optimal. Namun demikian, Kabupaten Agam menunjukkan alokasi anggaran yang lebih seimbang antara belanja rutin dan belanja modal dibandingkan Kabupaten Banjar Negara. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan strategi alokasi anggaran guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di masa mendatang.*

**Kata Kunci:** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kemandirian Keuangan, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Keserasian Anggaran

### PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah (Evichayani & Setiawina, 2016). Analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam tulisan ini, kami akan melakukan analisis terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Banjar Negara dan Kabupaten Agam untuk tahun anggaran 2020. Kabupaten Banjar Negara dan Kabupaten Agam merupakan dua daerah otonom di Indonesia yang memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Analisis terhadap laporan keuangan kedua daerah ini dapat memberikan perbandingan dan pembelajaran mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik analisis rasio keuangan, analisis vertikal-horizontal, maupun analisis trend (Panggabean, 2019). Dalam tulisan ini, kami akan menerapkan beberapa pendekatan tersebut untuk mengevaluasi kinerja keuangan Kabupaten Banjar Negara dan Kabupaten Agam, serta mengidentifikasi isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah Kabupaten Banjar Negara dan Kabupaten Agam pada tahun 2020. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi

bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik di masa mendatang.

Analisis ini akan mencakup beberapa aspek penting, seperti struktur pendapatan dan belanja, rasio-rasio keuangan, serta tren perkembangan keuangan daerah selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah Kabupaten Banjar Negara dan Kabupaten Agam, serta rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Analisis laporan keuangan pemerintah daerah merupakan langkah penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan suatu wilayah otonom. Dalam konteks ini, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Negara dan Kabupaten Agam untuk tahun 2020 menjadi fokus utama untuk memahami kondisi keuangan, kinerja, dan transparansi pengelolaan anggaran di tingkat lokal (Poppy Lestari, 2014). Kabupaten Banjar Negara dan Kabupaten Agam, masing-masing mewakili karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda, menawarkan wawasan yang berharga tentang berbagai pendekatan dan strategi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Analisis terhadap laporan keuangan ini tidak hanya sekadar menghitung angka, tetapi juga mencerminkan bagaimana penggunaan dana publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Padang, 2022). Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana pemerintah daerah telah mencapai tujuan keuangan mereka, serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan di masa yang akan datang. Dengan menerapkan berbagai pendekatan analisis, seperti rasio keuangan, analisis trend, dan evaluasi vertikal-horizontal, artikel ini bertujuan untuk menyajikan pandangan yang mendalam dan berimbang mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap struktur pendapatan, alokasi belanja, serta kebijakan fiskal yang diterapkan, diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan kontribusi positif dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif dan efisien di tingkat lokal. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mengupas kondisi keuangan kedua kabupaten tersebut, tetapi juga memberikan perspektif yang berarti bagi pembaca dalam memahami peran penting transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Analisis laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu proses penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan tingkat akuntabilitas suatu pemerintah daerah. Melalui analisis ini, pemerintah daerah dapat memahami posisi keuangan saat ini, mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan, dan merumuskan strategi peningkatan pengelolaan keuangan di masa mendatang. Salah satu komponen penting dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah rasio keuangan. Rasio-rasio seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah. Analisis rasio ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah (Firmansyah et al., 2022).

Selain rasio keuangan, analisis struktur pendapatan dan belanja juga menjadi bagian penting dalam memahami kinerja keuangan pemerintah daerah. Struktur pendapatan, misalnya, dapat memberikan informasi mengenai seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Sementara itu, struktur belanja dapat menunjukkan prioritas pembangunan dan fokus alokasi anggaran pada berbagai sektor. Analisis terhadap tren keuangan juga dapat menyediakan wawasan mengenai perkembangan kinerja keuangan daerah dari waktu ke waktu. Analisis laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu didukung dengan benchmarking atau perbandingan kinerja dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Hal ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai posisi relatif suatu daerah dan potensi-potensi peningkatan kinerja yang dapat ditempuh. Dengan menerapkan berbagai pendekatan analisis, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Rasio Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

- 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- 2) Mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
  - a. Rasio =  $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$
- 3) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 4) Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan realisasi PAD.
- 5) Rasio =  $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}}$
- 6) Rasio Efisiensi Belanja
- 7) Mengukur tingkat efisiensi realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran belanja.
- 8) Rasio =  $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$
- 9) Rasio Aktivitas Belanja
- 10) Menggambarkan komposisi atau struktur realisasi belanja, seperti rasio belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.
- 11) Rasio Belanja Operasi =  $\frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$
- 12) Rasio Belanja Modal =  $\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$
- 13) Rasio Pertumbuhan
- 14) Menunjukkan tingkat pertumbuhan komponen-komponen keuangan daerah, seperti pendapatan, belanja, aset, dan lain-lain.
- 15) Rasio Pertumbuhan Pendapatan =  $\frac{(\text{Pendapatan Tahun Ini} - \text{Pendapatan Tahun Lalu})}{\text{Pendapatan Tahun Lalu}}$
- 16) Rasio Derajat Desentralisasi
- 17) Mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.
- 18) Rasio =  $\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$
- 19) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
- 20) Mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal.
- 21) Rasio =  $\frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk menggambarkan, meringkas, dan mengungkapkan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena sosial yang ada di masyarakat, yang menjadi objek penelitian.

### Karakteristik Metode Kualitatif-Deskriptif

#### Deskripsi dan Gambaran :

Metode ini bertujuan untuk menarik realitas kondisi, situasi, atau fenomena yang diteliti ke permukaan. Ini dilakukan dengan cara memberikan ciri, karakteristik, sifat, model, tanda, atau gambaran yang jelas.

1. **Pendekatan Kualitatif:** Fokus utama penelitian ini adalah pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang ada. Data yang dikumpulkan cenderung bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik.
2. **Penggunaan Data Sekunder:** Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Agam. Data ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dapat dianggap memiliki tingkat keakuratan yang tinggi.

#### Analisis Data:

1. **Metode Analisis:** Data yang dikumpulkan dari LRA tersebut dianalisis menggunakan metode rasio. Metode rasio yang digunakan meliputi:
  - **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:** Untuk mengevaluasi sejauh mana daerah memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara mandiri.
  - **Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Untuk mengukur seberapa efektif pendapatan asli daerah dalam mendukung keuangan daerah.
  - **Rasio Kesenjangan:** Untuk mengevaluasi kesesuaian antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga menunjukkan keseimbangan anggaran yang tercipta.
2. **Tujuan Analisis:** Analisis rasio ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap kondisi keuangan daerah yang menjadi fokus penelitian.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kondisi keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Agam, serta menggambarkan berbagai aspek penting yang terkait dengan realitas sosial dan ekonomi di kedua daerah tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Keuangan LKPD

#### Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu rasio yang digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Rasio ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa tergantung pada sumber dana eksternal. Rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, menunjukkan

semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Rasio kemandirian yang rendah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat dan provinsi. Analisis rasio kemandirian ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal dan potensi daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri (Hanafi & Abdul, 2016)

Berikut hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah untuk Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 dan Kabupaten Agam tahun 2020:

a. Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) = Rp 238.638.994.321

Total Pendapatan Daerah = Rp 1.994.604.106.561

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =  $\text{PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah}$   
=  $\text{Rp } 238.638.994.321 / \text{Rp } 1.994.604.106.561 = 0,1196$  atau 11,96%

Jadi, rasio kemandirian keuangan Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 adalah 11,96% artinya Kabupaten Banjarnegara masih memiliki ketergantungan yang sedikit lebih besar terhadap sumber pendanaan eksternal.

b. Kabupaten Agam Tahun 2020:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) = Rp 107.162.961.554

Total Pendapatan Daerah = Rp 1.365.885.610.415

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =  $\text{PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah}$   
=  $\text{Rp } 107.162.961.554 / \text{Rp } 1.365.885.610.415 = 0,0784$  atau 7,84%.

Jadi, rasio kemandirian keuangan Kabupaten Agam tahun 2020 adalah 7,84%, artinya Kabupaten Agam memiliki ketergantungan yang cukup rendah terhadap sumber pendanaan eksternal.

### **Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah adalah salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan merealisasikan PAD. Rasio efektivitas yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu menggali sumber-sumber PAD dengan baik dan memanfaatkannya secara optimal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebaliknya, rasio efektivitas yang rendah menunjukkan pemerintah daerah belum mampu secara maksimal menggali potensi PAD yang dimiliki. Analisis rasio efektivitas PAD dapat memberikan gambaran sejauh mana tingkat capaian target penerimaan PAD suatu daerah (Maydiyanti et al., 2020). Berikut hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah untuk Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 dan Kabupaten Agam tahun 2020:

a. Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020:

Realisasi Penerimaan PAD = Rp 238.638.994.321

Target Penerimaan PAD = Rp 236.466.681.466

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah =  $\text{Realisasi Penerimaan PAD} / \text{Target Penerimaan PAD}$

=  $\text{Rp } 238.638.994.321 / \text{Rp } 236.466.681.466$

= 1,009 atau 100,9%

Jadi, rasio efektivitas keuangan Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 adalah 100,9%. Nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara sangat efektif dalam mengelola dan merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya, dan pemerintah Banjarnegara mampu mencapai target yang ditetapkan.

b. Kabupaten Agam Tahun 2020:

Realisasi Penerimaan PAD = Rp 107.162.961.554

Target Penerimaan PAD = Rp 110.526.600.179

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah = Realisasi Penerimaan PAD / Target Penerimaan PAD

= Rp 107.162.961.554 / Rp 110.526.600.179

= 0,9695 atau 96,95%

Jadi, rasio efektivitas keuangan Kabupaten Agam tahun 2020 adalah 96,95%.

Nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Agam juga cukup efektif dalam mengelola dan merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya, meski belum mencapai target yang ditetapkan.

### **Rasio Keserasian Keuangan Daerah**

Rasio Keserasian Keuangan Daerah adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal). Rasio ini terdiri dari dua jenis, yaitu Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Rasio Belanja Operasi menunjukkan porsi anggaran yang dialokasikan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai, barang dan jasa, serta pembayaran bunga utang. Sementara Rasio Belanja Modal menunjukkan porsi anggaran yang dialokasikan untuk belanja pembangunan seperti infrastruktur, sarana dan prasarana publik. Pemerintah daerah yang ideal akan mengalokasikan anggaran yang berimbang antara belanja operasi dan belanja modal agar dapat menjalankan roda pemerintahan sekaligus melakukan pembangunan di daerahnya. Analisis rasio keserasian keuangan daerah dapat memberikan gambaran mengenai kualitas belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Wardiningdyah, 2019). Berikut hasil perhitungan rasio keserasian keuangan daerah untuk Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 dan Kabupaten Agam tahun 2020:

a. Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020:

Belanja Operasi = Rp 1.632.717.887.919

Belanja Modal = Rp 348.505.249.709

Total Belanja Daerah = Rp 2.030.532.397.495

Rasio Belanja Operasi = Belanja Operasi / Total Belanja Daerah

= Rp 1.632.717.887.919 / Rp 2.030.532.397.495

= 0,804 atau 80,40%

Rasio Belanja Modal = Belanja Modal / Total Belanja Daerah

= Rp 348.505.249.709 / Rp 2.030.532.397.495

= 0,1716 atau 17,16%

Jadi, rasio belanja operasi Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 adalah 80,40% dan rasio belanja modal adalah 17,16%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran Kabupaten Banjarnegara lebih besar untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal.

b. Kabupaten Agam Tahun 2020:

Belanja Operasi	= Rp 1.023.188.642.188
Belanja Modal	= Rp 135.090.687.654
Total Belanja Daerah	= Rp 1.196.360.504.896
Rasio Belanja Operasi	= Belanja Operasi / Total Belanja Daerah = Rp 1.023.188.642.188 / Rp 1.196.360.504.896 = 0,8552 atau 85,52%
Rasio Belanja Modal	= Belanja Modal / Total Belanja Daerah = Rp 135.090.687.654 / Rp 1.196.360.504.896 = 0,1129 atau 11,29%

Jadi, rasio belanja operasi Kabupaten Agam tahun 2020 adalah 85,52% dan rasio belanja modal adalah 11,29%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran Kabupaten Agam juga lebih besar antara belanja operasi dan belanja modal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis rasio kemandirian, efektivitas, dan keserasian keuangan daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Agam tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa kedua kabupaten menunjukkan prestasi yang berbeda dalam aspek-aspek tertentu. Kedua kabupaten memiliki tingkat kemandirian keuangan yang baik dengan ketergantungan keuangan terhadap pusat yang rendah, masing-masing dengan rasio di bawah 20%, menandakan bahwa mereka cukup mandiri dan tidak bergantung secara signifikan pada sumber dana eksternal. Di sisi efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), keduanya mencatatkan kinerja yang cukup baik dengan rasio di atas 90%, menunjukkan bahwa potensi PAD telah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Namun, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan lagi efisiensi pengelolaan PAD guna mencapai target yang lebih ambisius. Secara keserasian anggaran, Kabupaten Agam menonjol dengan alokasi yang lebih seimbang antara belanja rutin dan belanja modal, sementara Kabupaten Banjarnegara perlu menyesuaikan strategi alokasi untuk mendukung pembangunan daerah secara lebih optimal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 5.3 (2016) : 403-428, 3, 403–428.
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 4(2), 181–197. <https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180>
- Hanafi, & Abdul, H. (2016). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Kelima Cetakan Pertama*. UPP STIM YKPN.
- Maydiyanti, S., Putri, A. M., & Anriva, D. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 69–78. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1975>

- Padang, N. N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Sains Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 51-63.  
<https://doi.org/10.55356/sak.v1i1.10>
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 151.  
<https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2692>
- Poppy Lestari. (2014). *Penyelenggaraan Layanan Daerah di Sektor Air Minum dan Sanitasi*. 21.
- Wardiningdyah, S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah*.  
<https://ditjenpktn.kemendag.go.id/upload/DOCUMENTS/PUBLIKASI/4.%20Analisis%20Laporan%20Keuangan%20Pemerintah%20Pusat%20Dan%20Daerah.pdf>.